

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dilahirkan dengan kodratnya untuk hidup bersama dengan lawan jenis untuk membentuk suatu ikatan keluarga yang kekal dan bahagia. Hasrat untuk hidup bersama memang telah menjadi pembawaan manusia yang merupakan suatu keharusan badaniah untuk melangsungkan hidupnya. Menurut kodrat alam, manusia ada di mana-mana dan pada zaman apapun juga selalu hidup bersama dan hidup berkelompok-kelompok. Sekurangnya kehidupannya bersama itu terdiri dari dua orang, suami-istri ataupun ibu dan bayinya. Dalam sejarah perkembangannya, manusia tidak dapat hidup sendiri, terpisah dari kelompok masyarakat lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa dan itupun hanya untuk sementara waktu. Masyarakat terbentuk apabila ada dua orang atau lebih hidup bersama, sehingga dalam pergaulan ada dua orang atau lebih hidup bersama, sehingga dalam pergaulan hidup itu timbul berbagai hubungan atau pertalian yang mengakibatkan bahwa seseorang dan yang lainnya saling kenal mengenal dan pengaruh-mempengaruhi.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan masyarakat yang pluralistik dengan beragam suku dan agama. Ini tercermin dari semboyan bangsa Indonesia yaitu *Bhinneka Tunggal Ika*. Dalam kondisi keberagaman seperti ini, terjadi interaksi sosial di antara kelompok-kelompok masyarakat

yang berbeda yang kemudian berlanjut pada hubungan perkawinan. Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam masyarakat. Dengan hidup bersama, kemudian melahirkan keturunan yang merupakan sendi utama bagi pembentukan negara dan bangsa. Mengingat pentingnya peranan hidup bersama, pengaturan mengenai perkawinan memang harus dilakukan oleh negara. Di sini, negara berperan untuk melegalkan hubungan hukum antara seorang pria dan wanita.

Perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut perkawinan di definisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karenanya dalam Undang-Undang yang sama diatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu serta telah dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

Bangsa Indonesia yang terkenal dengan budayanya yang tinggi serta menjunjung tinggi nilai-nilai kesusilaan dalam kehidupannya sehari-hari kini mulai mempersoalkan timbulnya fenomena baru dalam kehidupan bermasyarakat yaitu berupa penyimpangan kehidupan dibidang kejahatan seksual. Penyimpangan kesusilaan itu salah satunya ialah perbuatan “kumpul kebo”. Istilah ‘kumpul kebo’ merupakan istilah asli Indonesia. Kata ‘kumpul’ yang artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) :

bersama-sama menjadi satu kesatuan atau kelompok (tidak terpisah-pisah); berhimpun; berkampung; berapat (bersidang); berkerumun. Lalu 'kebo' artinya : kerbau. Sudah tentu yang dimaksudkan adalah arti kiasan, bukan arti yang sebenarnya : kerbau berkumpul, tetapi pasangan laki-laki dan perempuan kumpul seperti kerbau. Oleh sebab itu ada yang mengartikan 'kumpul kebo' adalah suatu perbuatan tinggal bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa diikat oleh suatu tali perkawinan yang sah.

Dalam Islam dikenal suatu pernikahan yang dinamakan pernikahan sirri¹, untuk istilah 'kawin sirri' secara etimologi (kebahasaan) kata 'as-sirr' berarti : sesuatu yang disembunyikan, yang dirahasiakan. Sedangkan secara terminologi 'kawin sirri' adalah perkawinan 'bila tasyhir' (tanpa diumumkan, tanpa disaksikan orang lain). Lebih jelas lagi, 'kawin sirri' adalah suatu perkawinan yang diadakan tanpa dua orang saksi yang adil. Pendapat lain 'kawin sirri' adalah suatu perkawinan yang saksi-saksinya disembunyikan sewaktu akad.² Sehingga apabila disebut sebagai 'kawin sirri' pengertiannya adalah perkawinan yang tidak dicatatkan di depan pencatat pernikahan (KUA). Menurut orang Indonesia yakni perkawinan yang tidak diformalkan sesuai dengan hukum positif yang berlaku, baik Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun UU No 1 tahun 1974. Perkawinan semacam ini sering disebut juga dengan 'kawin bawah tangan'.

Sehubungan dengan dimasukkannya kumpul kebo ke dalam Konsep (RUU) KUHP, akhir-akhir ini muncul beberapa pendapat yang pro dan

¹ Hasya, *Kumpul Kebo dan Kawin Siri*, <https://hasysa.wordpress.com/>, diakses tanggal 27 April 2017

² *Ibid.*

kontra yang justru menimbulkan konflik horizontal. Banyak negara menegaskan bahwa masalah kesusilaan tidak pernah dipersoalkan karena memang negara tidak berhak untuk mengurus masalah moral dan rasa kesusilaan masyarakat dan diaturnya kumpul kebo berarti dalam hal ini pemerintah telah memasuki ranah kehidupan seks pribadi.³ Sementara itu Andi Hamzah dan J.E. Sahetapy, sebenarnya juga telah menentang pasal tersebut.⁴ Mereka berpendapat bahwa satu aturan tidak bisa diterapkan di semua daerah. Kumpul kebo di pulau Jawa jelas dilarang, tetapi di Bali, Mentawai dan Minahasa, sampai kepala desanya pun melakukan kumpul kebo. Beberapa tindak pidana yang baru dirumuskan terlihat sudah terlalu jauh, yang berada di domain civil liberties (kebebasan rakyat), seperti kebebasan berpikir, kebebasan menyampaikan pendapat dan berekspresi, kebebasan beragama, dan kebebasan privat lainnya.⁵ Namun di pihak lain, ada yang mendukung dimasukkannya kumpul kebo sebagai suatu delik dalam Konsep (RUU) KUHP, dengan alasan bahwa kumpul kebo adalah suatu realitas sosial dan memunculkan problem sosial, tetapi tidak ada aturannya dan belum terjamah oleh hukum. Oleh karena itu wajar apabila kemudian dikodifikasikan dalam sebuah peraturan yang konkret dengan cara mengkriminalisasikannya sebagai suatu perbuatan pidana. Rencana pemberlakuan kumpul kebo sebagai suatu delik masih belum terbukti akan

³ Hukum Online, *Apa Kabar KUHP Baru?*, <http://www.HukumOnline.com>, diakses tanggal 27 April 2017

⁴ Bogor Today, *Pasal Karet Kumpul Kebo*, <http://www.bogor-today.com/>, diakses tanggal 27 April 2017

⁵ Marpaung Leden, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm.34

menimbulkan konflik horizontal. Selama ini di kampung-kampung pun berlaku norma yang menolak pelanggaran moral seperti itu sehingga pelakunya acap kali digerebek petugas hansip dan warga masyarakat yang merasa terganggu.

Kumpul kebo belum diatur dalam KUHP yang saat ini berlaku. Namun kumpul kebo oleh sebagian hukum adat yang hidup dan berkembang di Indonesia dianggap sebagai suatu kejahatan kesusilaan. Oleh karena itu, perancang undang-undang mulai memasukkan hukum adat (*gewoonrecht*) atau hukum yang berlaku di dalam masyarakat ke dalam RUU KUHP.

Kriminalisasi kumpul kebo dalam RUU KUHP muncul sebagai akibat dari kenyataan hidup bermasyarakat yang memang menghendaki hal tersebut. Masyarakat juga sering tidak bisa berbuat apa-apa ketika menjumpai praktek kumpul kebo. Tidak heran jika banyak terjadi main hakim sendiri di masyarakat.

Pelaku perzinaan ditelanjangi dan diarak karena mereka tahu, hukum tidak bisa menjangkau kejahatan seperti itu. Kumpul kebo merupakan suatu perbuatan yang memiliki ruang lingkup lebih luas daripada zinah atau perbuatan cabul lainnya. Kasus-kasus pergaulan bebas di kalangan masyarakat secara terselubung hampir dapat dirasakan bersama sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan kesopanan yang hidup di masyarakat. Tetapi hal yang justru dirasakan sebagai suatu pelanggaran terhadap suatu norma di masyarakat, masih sulit sekali dijangkau oleh KUHP yang merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda.

Secara yuridis hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini tidak dapat mengancam dengan sanksi pidana terhadap orang yang melakukan hubungan badan diluar perkawinan yang sah, apabila dilakukan oleh orang yang sudah dewasa atau kedua belah pihak tidak diikat oleh perkawinan dengan orang lain serta dilakukan tanpa adanya paksaan.⁶

Dalam Rancangan KUHP yang memasukkan tindak pidana tersebut dalam Pasal 488 yakni: *“Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah, dipidana pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.”* Penjelasan : Pasal 488 Ketentuan ini dalam masyarakat dikenal dengan istilah “kumpul kebo”.

Sebelumnya dalam RKUHP 2012. Hal ini sebelumnya diatur Dalam Pasal 485 Rancangan Undang-Undang KUHP disebutkan: *“Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami-istri di luar perkawinan yang sah dipidana penjara paling lama 1 tahun atau denda kategori II (paling banyak Rp 30 juta)”*

Konsep 2012 juga ruang lingkup sebetulnya mengurangi ruang lingkup tindak pidana kumpul kebo dari konsep dari tahun 1999/2000. Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP tersebut dalam Pasal 422 dinyatakan bahwa :

⁶ Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung : Sinar Baru, 1983, hlm.53

- 1) Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami-istri di luar perkawinan yang sah dipidana penjara paling lama 1 tahun atau denda kategori II (paling banyak Rp 30 juta).*
- 2) Tindak pidana sebagaimana diatur dalam ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan keluarga salah satu pembuat tindak pidana sampai derajat ketiga, Kepala adat, atau oleh kepala desa/Lurah setempat.*

Larangan yang ada di dalam Pasal 420 dan Pasal 422 RKUHP 1999/2000 dapat memenuhi kejahatan jika masyarakat setempat terganggu kesusilaannya. Hal ini berarti sepanjang masyarakat setempat tidak terganggu maka kumpul kebo tersebut tidak dilarang.

Sulit untuk memperkarakan kasus kumpul-kebo. Karena elemen tindak pidananya menyatakan “melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah”. Apa yang kemudian menjadi indikator hidup bersama sebagai suami istri? Dan sangat menyulitkan dalam pembuktiannya. Karena tindakan yang menjadi fokus permasalahan dalam praktek kumpul kebo adalah terjadinya hubungan persetubuhan (sexual intercourse). Implikasi yang paling besar justru bukan kepada pasangan yang belum menikah, namun justru kepada pasangan yang menikah, namun pernikahan yang tidak tercatat, (secara adat) dan tidak tercatat oleh ketentuan administrasi Negara seperti misalnya pernikahan siri. Di Indonesia masih sangat banyak pasangan yang melakukan pernikahan sah secara agama namun belum disahkan oleh negara.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat fenomena kumpul kebo dan membahasnya dalam bentuk skripsi. Karena disadari ataupun tidak, perbuatan kumpul kebo atau tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah telah hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia yang majemuk tanpa ada aturan hukum yang dapat mencegah dan menanggulangnya. Maka penulis mengangkat berbagai permasalahan yang timbul di atas menjadi sebuah karya ilmiah atau skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PASAL 488 RKUHP TENTANG “KUMPUL KEBO” (*COHABITATION*)”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi indikator “hidup bersama sebagai suami istri” dalam pasal 488 RKUHP tersebut?
2. Apakah perbuatan kumpul kebo dapat dikategorikan sebagai tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui indikator yang dikatakan hidup bersama sebagai suami-istri dalam pasal 488 RKUHP.
2. Untuk mengetahui penerapan pasal ini jika dikaitkan dengan pasangan yang menikah siri.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini baik secara teoritis dan praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan sebagai pertimbangan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada perumusan RUU KUHP pada ketentuan yang mengatur tentang “kumpul kebo” (*cohabitation*).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis, yaitu dapat memberi pemahaman dan masukan bagi masyarakat terkait dengan masalah “kumpul kebo” (*cohabitation*).

E. Kegunaan Penelitian

Atas dasar maksud, tujuan dan alasan yang penulis uraikan diatas maka, penulis berharap penelitian ini akan memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat berguna sebagai penambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang permasalahan yang dikaji oleh penulis, sekaligus sebagai syarat untuk penulisan tugas akhir dan menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana penambah wawasan maupun referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi masyarakat dalam pemahaman mengenai RKUHP tentang “kumpul kebo” (*cohabitation*).

F. Metode Penulisan

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu pendekatan yuridis normatif, berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi masalah yang telah diuraikan. Penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷

B. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif atau peraturan perundang-undangan, meliputi pasal 485 RKUHP, Kitab Undang-

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Kencana, 2010, hlm. 93

Undang Hukum Pidana, dan Rancangan Undang-Undang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berhubungan dengan objek penelitian seperti studi dokumen.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti ensiklopedi, kamus, glossary dan bahan lain seperti surat kabar atau majalah.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Dokumen

Dengan melakukan kegiatan pengumpulan data-data terkait dan penelusuran peraturan perundang-undangan.

b. Studi Kepustakaan

Dengan melakukan penelusuran dan pencarian bahan-bahan kepustakaan dari berbagai literatur atau buku-buku serta jurnal-jurnal yang mendukung penelitian

c. Studi Internet

Dengan melakukan penelusuran dan pencarian bahan-bahan melalui internet atau website untuk melengkapi bahan hukum lainnya.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan hukum ini, penulis membagi ke dalam empat bab yang bertujuan untuk mempermudah dalam memahami isi dari penulisan hukum ini. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat deskripsi atau uraian tentang kajian-kajian teori hukum terkait topik penulisan hukum ini yang menjadi dasar dalam pembahasan dan mendukung dalam proses penulisan tentang “kumpul kebo” (*cohabitation*).

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai pembahasan yang diteliti oleh penulis guna mengkaji dan menyesuaikan berdasarkan kenyataan yang ada, serta didukung dengan teori-teori yang relevan dalam permasalahan ini.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran atas hasil dari analisa permasalahan oleh penulis.